**BAB II**

**TINJUAN PUSTAKA**

**A. Literatur Review**

***Dinamika Gerakan Etnonasinalisme Kurdi Irak (Studi Kajian 1970 – 2012)*** Jurnal Ilmu PemerintahanTahun 2013Oleh **: Tunggul Ganggas Danisworo et al.**

Disebutkan dalam hasil penelitian jurnal tersebut bahwa asal mula gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak terbentuk ketika perjanjian *Skyess –Picott* yang disahkan oleh Prancis dan Inggris. Perjanjian ini membagi daerah Mesopotamia yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Ottoman Turki menjadi beberapa negara-negara seperti Iran, Irak, Suriah dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Konsekuensi dari perjanjian ini adalah terpecahnya etnis Kurdi secara geografis dengan proporsi jumlah demografi terbesar berada pada negara Irak dan Turki. Pemberontakan pertama yang menandakan lahirnya gerakan nasionalisme Kurdi di Irak terjadi pada tahun 1919, Syakh Mahmud Barzanji memproklamirkan perlawanan rakyat Kurdi Irak terhadap rezim kolonial Inggris, etnis Kurdi di Irak meminta Inggris meratifikasi Perjanjian Sevres yang dinilai menguntungkan entis Kurdi namun pada kenyataanya perjnjian tersebut di ratifikasi dengan Perjanjian Laussane yang mana isi perjanjian tersebut tidak menjelaskan pendirian negara Kurdistan maupun otonomi khusus.

Namun dalam pandangan penulis perjanjian *Skyess – Picott*bukanlah penentu pergerakan etnonasionalisme Kurdi melainkan perjanjian *Luhanase* yang memberikan Turki kesempatan mengosolidasikan kekuatan dan membentuk ulang peta wilayahnya dimana disebutkan dalamPerjanjian *Severes* janji Inggris untuk memberikan kemerdekaan dan pendirian negara Kurdistan dtidak disebtukan dalam perjanjian *Luhanase*. Secara pribadi saya memaklumi keterbatasan informasi dalam jurnal ini yang memuat sejarah Kurdi pasalnya belum banyak buku yang menyediakan sejarah utuh tentang bangsa Kurdi.

Metodologi dalam juranl tersebut memabantu penulis dalam menentukan pendekatan keilmuan utnuk mencari data. Lebih lanjut jurnal ini menjelaskan Metode analitis – deskriptif yang berarti mencari fakta dengan interpretasi tepat sehingga dapat membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang secara sistematis, faktual dan akurat faktaa – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki.

Pada bagian kesimpulan jurnal ini menyebutkan bahwa gerakan etnonasionalisme Kurdi adalah adanya kekuatan dominan dari etnis atau komunitas lain. Kasus lahirnya etnis Kurdi di Irak adalah karena adanya kekuatan-kekuataan dominan dari rezim-rezim yang berkuasa. Perubahan rezim tidak disertai dengan perubahan perilaku rezim tersebut, rezim yang selama ini menguasai Irak selalu bersikap represif kepada Kurdi, mulai dari rezim kolonial Inggris, Monarki hingga Republik tidak ada satupun dari rezim ini yang mau mengakomodasi kepentingan Kurdi. Penulis berpendapat bahwa kepentingan Etnis Kurdi di Irak semakin dipertimbangakn bukan ditindas sebagaimana yang disampaikan jurnal tersebut. Fakta bahwa pasca tumbangnya rezim Saddam setelah invasi Amerika Serikat etnis Kurdi di Irak diberikan otonomi khusus dan diberikan ijin memiliki angkatan senjata sendiri yakni *Peshmerga*. Bahkan Presiden Irak semasa okuspasi Amerika dipimpin oleh orang Kurdi yang bernama Jalal Talabani. Hal ini membantah penindasan pasca rezim Sadam yang lebih memperhatikan etnis Kurdi di Irak.

Namun bagaimanapun Jurnal ini memberikan banyak masukan tentang fakta fakta yang penulis belum ketahui sebelumnya khususnya di periode 1970 hingga 2012. Pada hakikatnya etnonasionalisme Kurdi merupakan modal awal solidaritas dan soliditas bangsa Kurdi untuk memperoleh kemerdekaanya dari Irak. Namun syarat untuk menjadi sebuah negara Kurdistan rupanya tidak dalam waktu dekat akan menjadi kenyataan. Adalah pengakuan dari negara lain merupakan hal penting dalam hubungan antar negara. Mengingat legitimasi politik Kurdi hanya sebatas otonomi di dalam negara Irak.

***Suku Kurdi dan Potensi Konflik Timur Tengah***Jurnal Hubungan InternasionalOleh **Ahmad Sahide** Tahun 2013

Dalam karya jurnalnya Ahmad Sahide mencoba menganalisa potensi konflik di Timur Tengah menyangkut tentang etnis Kurdi yang tinggal di wilayah tersebut. Pertama penulis akan menguraikan ulang isi jurnal Ahmad Sahide dalam pemetaan negara – negara Timur Tengah seperti Irak, Turki, Iran dan Suriah dimana jumlah etnis Kurdi cukup banyak di negara – negara itu. Gambaran umum terkait demografi penduduk Kurdi di empat negara tersebut membantu penulis untuk mencari data lebih banyak lagi terkait bangsa Kurdi yang berada di Timur Tengagh. Penjelasan mengenai sejarah bangsa Kurdi oleh Ahmadi Sahide cukup menarik, selain dari aspek sejarah jurnalnya pun memberikan gambaran konflik tentang kuat nya tribalisme di wilayah Timur Tengah.

 Kesimpulan dari jurnal ini menyatakan bahwa, Kebangkitan nasionalisme bangsa Kurdi, yang dimulai sejak Abad XIX tersebut serta kemerdekaan yang dijanjikan oleh Presiden AS Woodrow Wilson (1856–1924) melalui Perjanjian Sevres (The Treaty of Sevres) tahun 1920, memang menghadirkan tantangan unik pada orde politik yang kuat di wilayah Timur Tengah. Namun sepertinya cita-cita kemerdekaan tersebut semakin sulit terealisasi karena lokasinya yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak.

 Penulis sangat setuju dengan kerangka analisis penulis jurnal. Sejatinya Perjanjian Sevres merupakan bukti sejarah akan masa depan bangsa Kurdi. Namun karena kekuatan politik bangsa Arab sangat dominan di periode tersebut, maka Perjanjian Servres tidak berarti apa – apa bagi kemerdekaan Etnis Kurdi di Timur Tengah.

**Kurdi dan Agenda Balkanisasi Suriah** Artikel konflik Timur Tengaholeh **Marwan Osman** Tahun 2017.

Dalam artikel ini Marwan Osman menilai SDF (*Syrian Demorcatic Force*) adalah ancaman besar bagi stabilitas keamanan Suriah, yang mana SDF berjuang melawan ekspansi ISIS di Suriah yang didukung oleh pemerintah AS. Lebih lanjut menurutnya, ancaman semacam ini dapat berakibat pada stabilitas keamanan Timur Tengah. Karena SDF bisa berpotensi memiliki pemerintahan sendiri dan membentuk sebuah negara Kurdistan. Hal tersebut menurut artikel ini akan menguatkan posisi Israel di Timur karena bisa jadi apabila terbentuk negara Kurdi di Suriah maka Israel dengan leluasa memonitor musuh – musuhnya menggunakan fasilitas Kurdi.

 Bangsa Kurdi memang berjuang dari berbagai ancaman dan represi. Khususnya di Suriah dimana konflik dan terorisme menjadi satu masalah besar. Menurut penulis, Kurdi Suriah memerlukan pertahanan diri ketika pemerintah Suriah tidak dapat memberikanya. Ancaman nyata dari kelompok ISIS yang menjadikan wilayah – wilayah Kurdi menjadi benteng ISIS. Buka hanya itu, bahkan ISIS meneror etnis Kurdi Suriah apabila tidak mendukung kehendak kelompok Teroris itu. Mengingat tidak ada dukungn militer dari pemerintah Suriah maka kelompok politik Kurdi meminta dukungan AS untuk membantu mengusir ISIS di wilayah mereka di Utara Suriah.

 Memang agak logis asumsi dari artikel Marwan Osman. Karena dengan dukungan AS, Kurdi Suriah dapat melebarkan propaganda dan konsolidasi politik demi mencapai kemerdekaan yang diimpikanya. Apabila hal itu didukung AS sepenuhnya. artikel ini juga menguatkan data bahwa AS memang terlibat dalam percaturan pergerakan politik bangsa Kurdi. Tetapi hal itu tidak bisa dipastikan, apakah AS mendukung Kurdi untuk kemerdekaan atau hanya potensi kekyaan minyaknya yang diinginkan AS. Wilayah – wilayah yang diduduki etnis Kurdi memang memiliki cadangan minyak yang cukup besar oleh karenanya banyak negara besar menjalin kerjasama ilegal terkait pemebelian minyak dari wilayah otonomi khusus Kurdi.

**B. Kerangka Teoritis**

Definisi hubungan internasional menurut **Robert Jackson &George Sorensen** dalam bukunya yang berjudul ***Pengantar Studi Hubungan Internasional*** mendefiniskan: “HI dapat didefnisikan sebagai studi hubungan dan interaski antara negara – negara, termasuk aktifitas dan kebijakan pemerintah, oragnaisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan pemerintahanan multinasional.”[[1]](#footnote-2)

 Sebelum lebih jauh membahas teori – teori hubungan internasional maka penulis lebih dulu menyuguhkan teori dasar dari ilmu hubungan internasional yaitu teori politik. Karena pada dasarnya ilmu politik merupakan hal yang melekat pada studi hubungan internasional pada dasarnya interaksi antar negara – negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan kekuasaan. Menurut **Hans J. Morgenthau** “politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya dan cara – cara memperoleh, memelihara dan menujukan kekuasaannya menentukan teknik tindakan politik”.[[2]](#footnote-3)

Berikut konsep – konsep politik menurut **Miriam Budiardjo** dalam bukunya yang berjudul ***Dasar – Dasar Ilmu Politik***antara lain :

1. Negara (*state*)
2. Kekuasaan (*power*)
3. Pengambilan keputusan (*decision making*)
4. Kebijkan (*policy, beleid*)
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)[[3]](#footnote-4)

 Sehubungan objek variabel bebas penelitian mengenai suatu kebijakan negara (AS) dalam politik luar negerinya, maka perlu dijelaskan lebih lanjut definsi sebuah negara menurut Miriam Budiardjo sebagai berikut: “Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.”

 Karena kekuasaan adalah hal yang subtansial dalam ilmu politik dan ilmu hubungan internasional. Filsuf politik terkemuka seperti **Harold D. Laswel** dan **Abraham Kaplan** mendifinisakn power sebagai beikut: “kekuasaan adalah suatau hubungan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama” (*power is a relationship in which one person or group is able to determine*).[[4]](#footnote-5)

 Pendapat Harlod dan Abraham begitu melekeat pada sifat hegeomoni AS di dunia. AS sebagai negara hegeomon biasa menggunakan powernya untuk mempengaruhi tindakan politik negra lain melalui kebijakan – kebijakan politik luar negarinya. Definisi dasar kebijakan menurut Miriam Budiardjodalam bukunya yang berjudul *Dasar – Dasar Ilmu Politik*mendfinisikan : “ Kebijakan (*policy)* adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.”[[5]](#footnote-6)

 Sejalan dengan tindakan politik AS di Timur Tengah yang cenderung anarkis. Perang – perang yang dilakukan AS terhadap negara – negra Timur Tengah mencerminkan teori realisme sebagai suatu pijakan untuk menganalisis kebijakan politk luar negeri AS di Timur Tengah.

 Berkaitan dengan konsep politik luar negeri AS menurut **K.JHolsti** politik internasional dalam bukunya yang berjudul ***Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*** di gambarkan sebgai berikut : “dalam *world politics atau* politik internasional merupakan kajian serupa politik luar negeri. Keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur power negara besar.”[[6]](#footnote-7)

 Amerika Serikat mencipatkan sistem internasional dimana negara – negara di dunia terikat pada AS baik dalam bidang ekonomi maupun pada aspek keamanan. Sistem Internasional menurut **K.J Holsti** “sistem internasional bisa didefnisikan sebgai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur.”[[7]](#footnote-8)

 Politik luar negeri AS dan kepentingannya di Timur Tengah lebih banyak menimbulkan konflik ketimbang manfaanya lebih lanjut **K.J Holsti** memberikan penjelasan mengani Politik Internasional sebagai berikut : “Kebijaksanaan sikap, atau tindakan negara merupakan output politik luar negeri, output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan atau bentuk mengusahakan perubahan dalam linkungan internasional.”[[8]](#footnote-9)

Berdasarkan pengertian politik internasional dan politik luar negeri, dapat disimpulkan istilah *hubungan internasional* akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara – negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan, internasional, trasnportasi, komunikasi dan perkambangan nilai – nilai dan etika internasional. Kajian politik internasional tidak membahas jenis hubungan atau fenomena (gejala) tersebut, *kecuali jika hubungan tersebut digunakan untuk mengkaji tujuan negara atau dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan militer.[[9]](#footnote-10)*

Menurut **Anak Agung Banyu Perwita** dan **Yanyan Mochammad Yani** dalam bukunya yang berjudul ***Pengantar Ilmu Hubungan Internasional***mendefinisikan: ”Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut [kebijakan luar negeri](https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-luar-negeri-foreign-policy/5593).”[[10]](#footnote-11)

 Seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya, realisme dalam hubungan internasional adalah teori yang relevan untuk menggambarkan situasi keamanan dan politik di Timur Tengah karena semakin berpengaruhnya kekuatan dan kepentingan AS di kawasan ini, maka harus kita ketahui dahulu elemen – elemen realisme untuk dapat menganalisis kebijakan. Politik luar negeri AS di Timur Tengah berikut ide dan asumsi dasar kaum realis : (1) pandangan pesimis atas sifat manusia; (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai – nilai kemanan nasional dan kelangsungan hidup negara; (4) skeptisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik. Pemikiran dan asumsi ini mengendalikan pemikiran dari sebagian teoritisi HI realis terkemuka baik dimasa silam maupun dimasa sekarang.[[11]](#footnote-12)

 Pada dasarnya, **Kaum Realis** berasumsi poltiik dunia berkembang dalam anarki internasional yaitu:

**Sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan, tidak ada pemerintahan dunia. Negara adalah faktor utama dalam politik dunia. Hubungan internasional khususnya merupakan hubungan antar negara – negara. Semua aktor lain dalam politik dunia, individu – individu, organisasi internasional, dan sebgainya kurang penting atau tidak penting. Inti terpenting kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Tetapi negara – negara tidaklah sama: sebaliknya, terdapat hirearki internasional atas kekuasaan di antara negara – negara lainya. Nergara – negara yang paling penting dalam politik dunia adalah negara – negara berkekutan besar (*great powers*). [[12]](#footnote-13)**

Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini adalah nilai – nilai yang menggerakan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis. Negara dipandang esesnsial untuk kehidupan warga negaranya.

 **Thucydides, Maciavelli, Hobbes** dan tentunya semua kaum realis klasik sedikit memiliki pandangan tersebut. Mereka yakin bahwa:

**tujuan kekuasaan, alat – alat kekuasaan dan penggunaan kekuasaan merupakan perhatian utama aktivtias politik. Dengan demikin politik internasional digambarkan sebagai yang paling utama ‘politik kekuasaan(*power politics*)’: suatu arena persaingan, konflik dan perang antar negara – negara dimana masalah – masalah dasar yang sama dalam mempertahankan kepentingan nasional dan dalam menjamin kelangsungan hidup negara berulang sendiri secara terus menerus.[[13]](#footnote-14)**

 Pengaruh AS yang tak terbendung di kawasan Timur Tengah seolah diilhami oleh pandangan **Morgenthau** mengenai power :

**Jika masyarakat ingin memperoleh suatu wilayah politik yang bebas dari intervensi dan kendali pihak asing, mereka harus mengerahkan kekautan mereka dan meybebarkan kekuatanya untuk tujuan tersebut. Yaitu, mereka harus mengorganisasikan diri mereka sendiri ke dalam negara yang kuat dan efekttif yang dengan cara itu mereka dapat mempertahankan kepentinganya.[[14]](#footnote-15)**

Realisme strategis secara sentral memfokukan pada pembuatan keputusan luar negeri. **Schelling** adalah tokoh realis yang banyak menjalaskan konsep politik luar negeri dengan pendekatan realisme strategis, menurutnya: “aktivitas kebijakan politk luar negeri secara teknis bersifat instrumental dan karenanya bebas dari pilihan moral. Hal ini bukanlah yang paling diperhatikan tentang apa yag baik atau apa yang benar melainkan agar bagaimana suatu kebijakan dapat tercapai.”[[15]](#footnote-16)

Salah satu instrumen krusial kebijakan luar negeri bagi negara besar seperti Amerika Serikat adalah angkatan bersenjata. Dan salah satu yang menyangkut realisme strategis adalah penggunaan angkatan bersenjata dalam kebijakan luar negeri. Schelling mencurahkan banyak pemikiran dalam isu ini. Dia mengamati perbedaan penting antara keukuatan yang kejam dan kekerasan: ‘antara mengambil apa yang kamu inginkan dan membuat seseorang memberikanya kepadamu’[[16]](#footnote-17)

Tentu pendapat Schelling diperkuat dengan fakta bahwa AS sering menggunakan cara apapun demi meraih kepentingnaya di Timur Tengah, aspek moral tidaklah diperhatikan dalam pelaksanaanya. Seperti invasi AS ke terhadap Irak pada tahun 2003 yang diinisisasi oleh Mantan Presiden George W. Bush Jr. dalih invasi tersebut berkenaan dengan tuduhan bahwa rezim Saddam memiliki WMD (*weapon of mass destruction*) atau senjata pemusnah masal. Namun hingga saat ini tuduhan tersebut tidak terbukti justru dengan invasi AS, rakyat Irak sengsara akibat dampak invasi tersebut. Pasca invasi dunia melihat bahwa AS sebetulnya memiliki kepentingan ekonomi dibalik invasinya ke Irak: Menjalin persahabatan dengan kaum Kurdi Irak dan memberikan dukungan penuh demi terciptanya otonomi khusus di wilayah Kurdi yang kaya minyak itu.

Asumsi dari **Mearsheimer** menguatkan dugaan sementara penulis mengenai hegemoni AS di Timur Tengah berikut pernyataannya : “ Kekuatan besar (AS) selalu mencari peluang untuk mendapatkan kekuatan melebihi pesaingnya, dengan hegemoni sebagai cita – citanya.”[[17]](#footnote-18) Meskipun semua ahli berpendapat pasca Perang Dingin adalah pasca dimana ketiadaan pesaing hegemoni AS di diunia setelah tumbangnya Uni Soviet, namun pada kenyataanya negara – negara besar seperti Rusia masih berpengaruh di kawsan Timur Tengah. Perebutan pengaruh ekonomi dan politik begitu nampak terlihat dalam konflik Suriah antara AS dan Rusia. Dimana Rusia mendukung rezim Assad sedangakan AS mendukung pembrontak/oposisi.

Beralih ke kerangka teoritis varibael terikat yang akan membahas teori – teori seputar gerakan politik perjuangan etnis Kurdi, seperti definisi perjuangan, nasionalisme, etnis, etnonasionalisme dan terakhir gerakan politik. Dalam proses memperoleh kemerdekaan hal terpenting dari bangsa Kurdi adalah persatuan dan kesatuan yang solid untuk memperjuangkan kemerdekaanya. **Ernest Gellner** menjelaskan kaitannasionalisme dan gerakan poltik, berikut pemaparanya :

**Nasionalisme pada dasarnya adalah prinsip politik yang memegang kuat bahwa**

**unit politik dan nasional seharusnya kongruen. Nasionalisme dapat berbentuk**

**sentimen maupun gerakan. Sentimen nasionalisme adalah perasaan marah yang**

**muncul karena pelanggaran prinsip atau perasaan puas akibat pemenuhan suatu**

**prinsip. Sedangkan gerakan nasionalis adalah sesuatu hal yang ditunjukkan oleh**

**sentimen perasaan itu.[[18]](#footnote-19)**

Sebagai pembanding, definisi lain mengenai nasionalisme dikemukaan oleh **Soemarsono Mestoko** dalam bukunya yang berjudul *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa* mennyatakan : “ Nasionalisme sebagai suatu bentuk pemikiran dan cara pandang yang mengaggap semua bangsa sebagai bentuk organisasi politik yang ideal. Suatu kelompok manusia dapat disatukan menjadi bangsa karena unsur – unsur pengalaman sejarah yang sama, dalam arti pengalaman penderitaan atau kejayaaan bersama.[[19]](#footnote-20)Dalam pandangan penulis bangsa Kurdi adalah bangsa di era modern yang masih hidup dibawah payung pemerintahan mayoritas Arab, mengingat jumlahnya cukup besar di Timur Tengah, maka pergerakan politik baik dengan cara damai maupun dengan mengangkat senjata merupakan cerminan semangat nasionanlisme mereka. Karena dari segi etnis Bangsa Kurdi buknlah keturunan dari Bangsa Arab. Di era politik modern menjadi hal yang wajar ketika minoritas menginingkan disintergrasi dari negera induknya, identitas etnis yang berbeda dijadikan pijakan awal persatuan dan solidaritas etnis Kurdi di Timur Tengah.

 Menurut **Young**, dalam jurnalnya *identity politics* menjelaskan :

**politik identitas berkaitan secara erat dengan gagasan atau ide tentang terjadinya penindasan terhadap kelompok-kelompok sosial berkaitan dengan identitas mereka (baik berdasarkan ras, etnis, gender, seksualitas, kelas, dll). Artinya, identitas seseorang sebagai seorang wanita atau sebagai seorang penduduk asli Amerika misalnya, membuatnya rentan terhadap imperialisme kultural (termasuk terjadinya stereotipe atau penyalahgunaan identitas kelompok), kekerasan, eksploitasi, serta marjinalisasi atau ketidakberdayaaan.[[20]](#footnote-21)**

 Agar lebih jelas tentang keterkaitan etnis Kurdi dan definisi etnis itu sendiri, penulis akan memaparakan penjelasan menurut para ahli sosiologi sebagai berikut: **Donald L. Horowitz** yang dikutip **Larry Diamond** dan **Marc F. Plattner**mendefinisikan:

**kelompok etnis sebagai suatu kelompok yang sangat eksklusif dan relatif berskala besar yang didasarkan pada ide tentang kesamaan asal-usul, keanggotaan yang terutama berdasarkan kekerabatan, dan secara khusus menunjukkan kadar kekhasan budaya, yang mencakup kelompok-kelompok yang dibedakan oleh warna kulit, bahasa, dan agama. Etnis meliputi suku bangsa, ras, kebangsaan dan kasta.[[21]](#footnote-22)**

Koentjaraningrat menbambahkan definisi etnik dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Antropologi* sebagai berikut : “suku bangsa atau dalam bahasa Inggris *ethnic group* (kelompok etnis) adalah suatu golongan manusia yang terikat kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaa.”[[22]](#footnote-23)

 Dari beberapa pengertian etnis, dapat disimpulkan bahwa suku Kurdi sebagai suatu kelompok etnis di Irak selain etnis Arab dan etnis minoritas Turkoman serta Assirya. Suku Kurdi sebagai kelompok etnis mempunyai kesamaan asal-usul, adat-istiadat, bahasa (Kurmanji dan sorani/kurdi), kebudayaan, dan wilayah (Kurdistan), namun saat ini mereka terpecah dalam beberapa negara seperti Turki, Iran, Suriah dan di Irak.

 Etnonasionalisme merujuk pada nasionalisme tertentu, menyangkut populasi yang telah menjadi bagian dari otoritas bangsa namun menuntut otonomi atau kemerdekaan yang berdasarkan identitas etnis dan budaya.[[23]](#footnote-24) Adapun **Gurr** mendefinisikan etnonasionalisme sebagai berikut : “Etnonasionalis merupakan masyarakat yang terkonsentrasi secara regional, memiliki sejarah otonomi politik dan memiliki tujuan separatis.”[[24]](#footnote-25)

 Pada awalnya gerakan etnonasionalisme berusaha untuk mendudukkan orang se-etnik dalam pemerintahan, lama-kelamaan akan berkembang menjadi gerakan separatisme untuk bisa melepaskan diri atau keluar dari tatanan negarabangsa. Untuk lebih memahami pengertian separatisme, berikut penjelasan dari wikipedia: “secara politis separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan sutau wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasionalisme yang tajam).”[[25]](#footnote-26)

 Merujuk pada pada pengertian separtisme yang mana hal tersebut meruapakan bagian dari gerakan politik, adapun definisinya sebagai berikut :

 **Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat bekisar disekitar satu masalah atau dari rerangkaian isu permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat**[**pemilu**](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu)**atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut.[[26]](#footnote-27)**

**Asumsi**

1. Gerakan politik kemerdekaan Kurdi akan terus berkembang di Timur Tengah karena semangat nasionlisme mereka sudah menjelma menjadi unit – unit gerakan politik yang legal sebagaimana yang terjadi di Irak melalui pemebentukan KRG (*Kurdistan Regional Government*) dari tahun 2005.
2. AS akan mendukung gerakan politik Kurdi, meskipun belum mendukung pendirian negara Kurdisatan secara penuh dengan alasan akan membahyakan stabitilas keamanan di Timur Tengah .

**C. Hipotesis Penelitian**

**Jika dukungan dan kerjasama politik - keamanan dalam menjaga keseimbangan merupakan strategi kebijakan politik luar negeri AS di “Timur Tengah”, maka terjadinya berbagai pembrontakan serta gerakan politik merupakan proses perjuangan pembebasan bagi etnis Kurdi.**

**D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Tabel 1 Operasioanal Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel****(Konsep Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| ***Variabel Bebas*:****Strategi kebijkan politik luar negeri AS di “Timur Tengah” terhadap Etnis Kurdi** | **1.Dukungan Kerjasama Politik -Keamanan AS Terhadap Gerakan Politik Kaum Kurdistan Di Timur Tengah** | * Pada Tahun 2005 setelah invasi dan tumbangnya rezim Saddam Hussein, Amerika secara tidak langsung “menghadiahi” Kurdi Irak dengan otonom khsusus yang diakui oleh konstitusi dengan berbagai kekuasaan istimewa (memilik pasukan sendiri, kebijakan luar negeri tanpa batas, dan otoritas kewarganegaraan). Seperti yang tertuang pada pasal 4 dan 113 konstitusi Irak. (sumber : dikelola dari jurnal *Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak* oleh Tunggul Ganggas Danisworo et al
 |
| * Kurdi di Suriah selalu digambarkan sebagai kekuatan yang terdepan melawan ISIS. Bersama SDF, milisi Kurdi  bekerja sama dengan AS dalam operasi yang diberi sandi “Operation Inherent Resolve”. (sumber : <http://ic-mes.org>)
* PYD dan YPG (kelompok politik Kurdi Suriah) berkoalisi dengan Pemerintah AS yang mengirim sekitar 2000 pasukan di wilayah Suriah. Ini belum termasuk pasukan khusus dan operasi militer rahasia, yang berlangsung di sana. Belakangan, Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, mengatakan akan mempertahankan pasukan AS lebih lama untuk melawan pengaruh ISIS, Al Qaeda, dan Iran (sumber : <https://dunia.tempo.co> )
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Variabel Terikat:******Berbagai* Pembrontakan serta gerakan politik dalam proses perjuangan etnis Kurdi** | **1) Perjuangan Etnis Kurdi Memperoleh Hak Politik** | * Konstitusi Irak pada tahun 2005 mengakui wilayah otonomi Kurdistan di utara negara tersebut, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (sumber : <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28147263> )
* Pengumuman resmi hasil referendum kemerdekaan Kurdi yang diselenggarakan Senin 25 September 2017. Dinyatakan pengumpulan suara menunjukkan 92,73% warga ingin merdeka dari Irak (Sumber : <http://www.dw.com> )
 |
|  | **2) Munculnya berbagai gerakan politik pembebasan kaum Kurdi di Timur Tengah** | * Partai Pekerja Kurdistan atau dikenal juga Partai Komunis Kurdi (PKK) adalah kelompok bersenjata yang berbasis di Turki. Tuntutan mereka adalah sebuah negara Kurdi yang merdeka dan independen, namun dalam beberapa tahun terakhir ini, tuntutan mereka berkurang dan hanya menuntut wilayah otonomi khusus dan penarikan tentara Turki dari wilayah tersebut. (sumber : <http://www.moslemtoday.com/mengapa-erdogan-sampai-memiliki-masalah-dengan-organisasi-militan-kurdi-pkk-ypg/> )
* Pada 1945, beridiri Partai Demokratik Kurdi Iran (KDPI) yang menggabungkan semua gerakan kurdi Iran(sumber: dikelola dari jurnal dengan judul *Suku Kurdi dan Potensi Konflik Timur Tengah* oleh Ahmad Sahide)
* (The Democratic Union Party) adalah Gerakan Politik Kurdi di Suriah yang memiliki keinginan yang sama untuk mendirikan negara Kurdi di Wilayah Suriah (sumber: Marwa Osman, “Kurdi dan Agenda Balkanisasi Suriah”, <http://ic-mes.org/politics/kurdi-dan-agenda-balkanisasi-suriah/>,)
 |

**E. Skema Kerangaka Teoritis**

**Gambar 1**

**Strategi – Politik Luar Negeri AS**

**Agenda Global AS**

**Turki, Iran, Irak dan Suriah**

**Obesesi Pendirian Negara Kurdistan**

**Gerakan Politik Kurdi**

**Etnis Kurdi**

**Kerjasama Politik - Keamanan**

**HAM, Demokrasi, dan Terorisme**

1. Robert Jackson & George Sorensen, , *Pengatar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 4. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid. hlm. 112 [↑](#footnote-ref-3)
3. Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*(Jakarta: PT Grmedia Utama, 2008), hlm. 16 - 17 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid., hlm. 59. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid., hlm. 20. [↑](#footnote-ref-6)
6. K.J Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*(Binacipta: Bandung, 1987), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid., hlm, 35. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid., hlm, 135. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid., hlm. 26 – 27. [↑](#footnote-ref-10)
10. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani, *Pengnatar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 47 – 48. [↑](#footnote-ref-11)
11. Robert Jackson & Georg Sorensen, Op.Cit., hlm, 112. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid., hlm. 113. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid., [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid., hlm. 125. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid., hlm. 131. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid., hlm. 133. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid., hlm. 147. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ernest Gellner, Nation and Nationalism, dalam Richard K. Betts, Ed., Conflict AfterThe Cold War: Arguments on Causes of War and Peace, New York: Macmillan, 1994, hal. 280 [↑](#footnote-ref-19)
19. Soemarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa*(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-20)
20. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Identity Politics, *http://plato.stanford.edu/entries/identity-politics*., diakses pada 9 maret 2018 [↑](#footnote-ref-21)
21. Diamond, Larry dan Marc F. Plattner*, Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*(Bandung: ITB,1998), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-22)
22. Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*(Jakrata, Rineka Cipta, 1990), hlm. 264 [↑](#footnote-ref-23)
23. Bolaffi, Guido, et al*., Dictionary of Race, Ethnicity and Culture*.(London: SAGE Publication Ltd, 2003) [↑](#footnote-ref-24)
24. Gurr, Ted Robert, *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts* (Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1993), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-25)
25. <https://id.wikipedia.org/wiki/Separatisme>. “Separatisme”, Diakses 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-26)
26. <https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_politik>. “Gerakan politik”, Diakses 9 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-27)